

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen mendasar dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024), pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, efektivitas pengelolaan anggaran, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. PAD mencakup pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi lokalnya untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh (Budianto, 2016) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, di mana peningkatan PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai belanja modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di berbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung (Lampung, 2024), PAD provinsi ini mengalami penurunan dari Rp3,678 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp3,249 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan masih lemahnya kemampuan pemerintah

daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung kemampuan fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Meski bertujuan mulia, ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan sering kali menjadi kendala dalam mencapai kemandirian fiskal. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% pendapatan daerah Provinsi Lampung pada periode 2021-2023 berasal dari Dana Perimbangan, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Selain PAD dan Dana Perimbangan, belanja modal juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Belanja modal mencakup investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Idealnya, belanja modal yang optimal dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangannya untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, di Provinsi Lampung, alokasi belanja modal masih menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa alokasi belanja modal mengalami penurunan dari Rp2,275 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,629 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa investasi dalam sektor-sektor strategis belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, realisasi belanja modal hanya mencapai 12% dari total anggaran daerah pada tahun 2022, jauh di bawah rekomendasi internasional yang menyarankan alokasi minimal 20% untuk sektor pembangunan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara PAD, Dana Perimbangan, dan kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan belanja modal

sebagai variabel intervening. Studi yang dilakukan oleh (Amanda, 2023) mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja daerah yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian lainnya oleh (Utary, 2021) di Kota Sukabumi juga menunjukkan bahwa alokasi PAD yang optimal dapat mendukung peningkatan belanja modal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Fenomena ini juga tercermin di Provinsi Lampung, di mana keterbatasan dalam optimalisasi PAD dan alokasi belanja modal menjadi isu utama. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, penting untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan dengan menggali potensi pendapatan asli daerah melalui inovasi kebijakan dan pengelolaan yang transparan.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,99% dengan realisasi belanja modal mencapai 73,12%, menunjukkan peningkatan efisiensi pelaksanaan proyek pembangunan (Lampung, 2024). Namun, kinerja ini belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat ketergantungan tinggi pada Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan strategi yang lebih inovatif dalam menggali potensi PAD, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Langkah-langkah seperti optimalisasi perencanaan proyek pembangunan dan penguatan pengawasan anggaran melalui panitia khusus DPRD menjadi penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kinerja keuangan daerah sering diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya dengan

mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Di Bandar Lampung, meskipun terdapat peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir, rasio kemandirian fiskal masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada sumber pendanaan eksternal, menandakan bahwa upaya optimalisasi PAD masih perlu ditingkatkan. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena rasio kemandirian yang rendah dapat berdampak pada efektivitas belanja modal dan kualitas pelayanan publik. Dengan alokasi PAD yang lebih optimal, Bandar Lampung memiliki potensi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan, yang pada akhirnya dapat memperbaiki infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemanfaatan rasio kemandirian sebagai indikator kinerja keuangan bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Dengan mengambil studi kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada periode 2021-2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Penelitian ini juga mengadopsi teori keagenan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini mengadaptasi kerangka penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Angraesti, 2024), yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". Penelitian Angraesti menitikberatkan pada analisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

selama periode 2018-2022, dengan menyoroti peran belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian tersebut menghasilkan temuan penting terkait kontribusi PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, sementara pengaruh Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada alokasi dan penggunaannya di setiap daerah.

Sebagai bentuk replikasi, penelitian ini mengacu pada pendekatan yang serupa, namun dengan perbedaan signifikan pada wilayah dan periode penelitian. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini mengalihkan perhatian pada Provinsi Lampung, yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan fiskal yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mencakup data pada periode yang lebih terkini, yakni tahun 2021-2023, yang mencerminkan dinamika keuangan daerah di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Perbedaan dalam konteks wilayah menjadi relevan karena Provinsi Lampung menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan keuangannya. Seperti yang telah diuraikan, kontribusi PAD di Lampung terhadap total pendapatan daerah cenderung rendah, sementara ketergantungan terhadap Dana Perimbangan masih dominan. Hal ini memberikan peluang untuk mengidentifikasi pola yang mungkin berbeda dari temuan di Jawa Barat, terutama terkait bagaimana belanja modal memainkan peran sebagai penghubung antara PAD, Dana Perimbangan, dan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokuskan serta mencegah meluasnya pembahasan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah secara tidak langsung pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal?
6. Apakah secara tidak langsung dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
3. Untuk membuktikan pengaruh secara tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal.

4. Untuk membuktikan pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk membuktikan pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal.
6. Untuk membuktikan pengaruh secara tidak langsung dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi studi lebih lanjut mengenai hubungan antara sumber pendapatan daerah dan kinerja keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan, serta menjadi alat evaluasi bagi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dan memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Serta menambah literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematik berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan secara ringkas tentang dasar-dasar teroi yang didapat dari literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu diuraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan secara ringkas dan mudah dipahami.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara deskriptif mengenai hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk table dan gambar.